



LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN

1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Transaksi Pembayaran Nontunai pada Sekretariat DPRD.
4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. PMK No. 230/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapatan dan Belanja.



DAFTAR INFORMAN

Berikut adalah daftar informan yang peneliti wawancarai dalam pengambilan data :

1. Nama : Drs. H. Masrawan, M. Ag
NIP : 196704061994031002
Jabatan : Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Pulang Pisau

2. Nama : Langgeng Murdopo, SE., M.Si
NIP : 197312252005011007
Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan

3. Nama : Jiyono, S.Th., M.Th
NIP : 19790602 200912 1 005
Jabatan : Bendahara Pengeluaran





Foto wawancara bersama Kepala Kanwil Kemenag Kalteng
Drs. H. Masrawan, M.Ag



Foto wawancara bersama Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag Kalteng Langgeng Murdopo, S.E., M.Si



Foto wawancara bersama Bendahara Pengeluaran Kanwil Kemenag Kalteng Jiyono, S.Th., M.Th.